

ERDOĞAN DAN KONVERGENSI SUMBER DAYA GEOSTRATEGIS TURKI: PELAJARAN BAGI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Ukik Ari Nursanto¹, Reno Triambodo², Tarsisius Susilo³, Wahyu Ramadhanus⁴,
Thomas H.K Sinaga⁵

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

1cavalryman46@gmail.com,2reno.indy.raditya@gmail.com,3muchus70@gmail.com

Abstrak : Recep Tayyip Erdoğan telah memanfaatkan posisi unik Turki di persimpangan Eropa-Asia dengan warisan Ottoman, secara optimal untuk membangun pengaruh regional. Melalui *konvergensi sumber daya geostrategis*, Erdoğan mengintegrasikan keunggulan letak geografis, kekuatan militer domestik, dan modal sejarah-budaya guna menjadikan Turki pemain utama kawasan. Tulisan ini menganalisis strategi Erdoğan dalam memanfaatkan lokasi strategis (selat Bosphorus dan Dardanella), kekuatan militer/industri pertahanan (mis. drone Bayraktar, doktrin *Blue Homeland*), serta warisan historis Ottoman dan soft power (serial televisi, diplomasi Muslim) yang menopang kepemimpinan Turki di dunia Islam. Selanjutnya, dibahas relevansi dan pelajaran bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan strategis di Indo-Pasifik, untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Dengan metode analisis strategis komparatif, teridentifikasi beberapa elemen kunci: (a) pentingnya memanfaatkan posisi geostrategis (selat dan chokepoint) melalui diplomasi dan penegakan kedaulatan; (b) pembangunan kekuatan maritim nasional dan kemandirian industri pertahanan; (c) penggunaan modal sejarah dan diplomasi budaya untuk mendukung kepemimpinan regional; serta (d) penyesuaian strategi dengan konteks Indonesia yang berprinsip bebas-aktif dan damai. Kesimpulannya, Indonesia dapat mengadaptasi strategi “konvergensi” ala Erdoğan secara konstruktif – membangun sea power yang tangguh, diplomasi maritim proaktif, dan identitas maritim yang kuat untuk menjadi Poros Maritim Dunia yang berpengaruh namun tetap menjunjung perdamaian sesuai nilai Pancasila.

Kata Kunci: Erdoğan, Konvergensi, Sumber Daya Geostrategis Turki, Pelajaran Bagi Indonesia, Poros Maritim Dunia

Abstract : Recep Tayyip Erdoğan has capitalized on Turkey's unique position at the crossroads of Europe and Asia with an Ottoman heritage to assert regional influence. Through a convergence of geostrategic resources, Erdoğan integrates Turkey's geographical advantages, domestically built military power, and historical-cultural capital to elevate Turkey as a regional player. This paper examines Erdoğan's strategy in leveraging strategic location (the Bosphorus and Dardanelles straits), military strength and defense industry (e.g. Bayraktar drones, the "Blue Homeland" doctrine), as well as Ottoman historical legacy and soft power (popular TV series, Muslim diplomacy) that bolster Turkey's leadership in the Islamic world. It then discusses the relevance and lessons for Indonesia a strategically located archipelago in the Indo-Pacific in realizing its Global Maritime Fulcrum vision. Using comparative strategic analysis, we identify key elements: (a) the importance of exploiting geostrategic location (chokepoint straits) via diplomacy and sovereignty enforcement; (b) building national maritime power and self-reliant defense industries; (c) harnessing historical capital and cultural diplomacy to support regional leadership; and (d) adapting strategies to Indonesia's context of a non-aligned, peace-oriented foreign policy. In conclusion, Indonesia can constructively adapt Erdoğan's "convergence" approach by developing robust sea power, proactive maritime diplomacy, and a strong maritime identity to become a Global Maritime Fulcrum that is influential yet remains peaceful in line with Pancasila values.

Keywords: Erdoğan, Convergence, Turkey's Geostrategic Resources, Lessons for Indonesia, Global Maritime Fulcrum

Pendahuluan

Recep Tayyip Erdoğan telah menunjukkan kepemimpinan yang memanfaatkan posisi geografis dan warisan historis Turki secara maksimal untuk meningkatkan peran negaranya. Turki terletak di persimpangan benua Eropa dan Asia, menguasai jalur strategis Laut Hitam–Laut Mediterania melalui selat Bosphorus dan Dardanella, yang sejak lama memberinya signifikansi geostrategis. Warisan Kekaisaran Ottoman menambah dimensi historis-budaya yang unik, sementara aset nasional seperti kekuatan militer dan ekonomi memberikan modal keras bagi ambisi politik luar negeri Ankara. Erdoğan mengonvergensi berbagai sumber daya geostrategis, geo-lokasi, kekuatan militer, dan modal sejarah dan diplomasi menjadi kekuatan terpadu untuk menjadikan Turki pemain utama regional. Pertanyaannya, sejauh mana strategi Erdoğan berhasil memanfaatkan keunggulan geografis, kekuatan militer, dan warisan budaya demi kepentingan nasional Turki? Dan pelajaran apa yang bisa dipetik Indonesia, negara kepulauan terbesar yang memiliki posisi tak kalah strategis, dalam upayanya mewujudkan diri sebagai *Poros Maritim Dunia*?

Tulisan ini berangkat dari dua persoalan utama. Pertama, bagaimana strategi Erdoğan dalam memanfaatkan lokasi strategis Turki, kekuatan militernya, serta modal historis-budaya Ottoman untuk menjadikan Turki kekuatan regional yang disegani? Kedua, pelajaran apa yang dapat diadaptasi Indonesia sebagai negara kepulauan strategis yang bercita-cita menjadi Poros Maritim Dunia? Artinya, sejauh mana pengalaman Turki di bawah Erdoğan dapat menginspirasi doktrin dan kebijakan maritim Indonesia agar lebih efektif memanfaatkan potensi geostrategis Nusantara.

Pembahasan ini penting karena Indonesia, seperti halnya Turki, dianugerahi posisi geostrategis yang vital. Indonesia terletak di antara dua samudra (Hindia dan Pasifik) serta dua benua, dan mengontrol beberapa choke point maritim global (misalnya Selat Malaka). Di era globalisasi dan persaingan kekuatan besar saat ini, kepemimpinan nasional dituntut mampu *meng-leverage* keunggulan geografis menjadi kekuatan nyata, baik secara ekonomi maupun pertahanan. Presiden Joko Widodo telah menggagas visi Indonesia sebagai *Global Maritime Fulcrum* (Poros Maritim Dunia) sejak 2014, dengan lima pilar utama: budaya maritim, ekonomi maritim, infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Namun, implementasi visi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Studi komparatif terhadap strategi maritim Turki di era Erdoğan menawarkan wawasan berharga untuk merumuskan doktrin dan kebijakan maritim Indonesia ke depan. Dengan memahami faktor-faktor keberhasilan Turki (maupun keterbatasannya), Indonesia dapat lebih tepat mengembangkan strategi Poros Maritim Dunia yang sesuai konteks nasional dan dinamika regional Indo-Pasifik.

Tinjauan Pustaka

- a. **Konvergensi Sumber Daya Geostrategis:** Konsep *geostrategic resources* merujuk pada sumber-sumber daya geopolitik yang dapat dimanfaatkan sebuah negara, termasuk faktor non-material seperti posisi geografis, jalur perdagangan, demografi, dan warisan historis. Dalam literatur geopolitik klasik, posisi Turki di persimpangan Eurasia disebut memberi keuntungan strategis tersendiri (Davutoğlu menyebutnya “*strategic depth*”). Kontrol Turki atas selat Bosphorus dan Dardanella pintu gerbang dari Laut Hitam ke Mediterania dikategorikan sebagai *choke point* vital, karena berpengaruh terhadap arus energi (minyak/gas) dan pergerakan militer di kawasan. Secara hukum internasional, Konvensi Montreux 1936 memberikan Ankara hak mengatur lalu lintas kapal perang asing di selat tersebut. Turki dapat menutup selat bagi kapal

perang saat perang, sementara kapal dagang dijamin lewat bebas. Hal ini menjadikan selat Turki sebuah kartu truf geopolitik misalnya pada 2022 Turki membatasi kapal perang masuk Laut Hitam saat konflik Ukraina, menunjukkan leverage dari Montreux.

b. **Era Erdoğan ditandai oleh doktrin maritim *Mavi Vatan* (*Blue Homeland*)**. Doktrin ini digagas untuk memaksimalkan klaim maritim Turki di Laut Hitam, Aegean, dan Mediterania. Studi menyebut konsep Blue Homeland, dikembangkan sejak 2006 oleh Laksamana Cem Gürdeniz, diadopsi resmi dalam strategi Angkatan Laut Turki pada 2020. Blue Homeland dianggap sebagai bentuk neo-Ottomanisme maritim yang bertujuan mengembalikan peran historis Turki sebagai kekuatan besar regional. Dengan kerangka pikir tersebut, rivalitas Turki-Yunani atas perbatasan maritim dan sumber energi lepas pantai di Mediterania Timur dipandang Turki sebagai kesempatan memperluas pengaruh. Hasilnya, doktrin ini mendorong modernisasi besar-besaran Angkatan Laut Turki dan upaya mencapai *strategic autonomy* penuh. Spirit neo-Ottomanisme ini selaras dengan visi Erdoğan menjadikan Turki pemimpin dunia Islam dan pemain kunci di Timur Tengah, sebuah ambisi yang juga tercermin dalam kebijakan simbolis seperti konversi Hagia Sophia kembali menjadi masjid pada 2020 (dilihat sebagai klaim kepemimpinan dunia Muslim).

c. **Kekuatan Militer dan Ekonomi Turki:** Sejak awal kekuasaannya (2003), Erdoğan sangat menekankan penguatan militer dan industri pertahanan dalam negeri. Turki bertransformasi dari importir senjata menjadi salah satu eksportir utama. Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan ekspor senjata Turki meningkat 103% pada periode 2015–2019 ke 2020–2024, menjadikan Turki eksportir senjata terbesar ke-11 dunia (pangsa 1,7%). Sektor andalan adalah drone tempur tanpa awak (UAV) seperti Bayraktar TB2, produksi perusahaan Baykar yang dimiliki menantu Erdoğan, Selçuk Bayraktar. Drone TB2 terbukti efektif di berbagai konflik dari Suriah dan Libya hingga kemenangan Azerbaijan melawan Armenia 2020, dan terakhir membantu pertahanan Ukraina. Dengan harga relatif murah namun mematikan, TB2 membuka era baru “demokratisasi” senjata presisi bagi negara berkembang. Bayraktar TB2 kini digunakan di 35 negara dan menjadi ikon ekspor industri pertahanan Turki. Bahkan ekspor pesawat nirawak menyumbang 98–99% pendapatan Baykar pada 2022. Selain drone, Turki juga memproduksi kapal perang (misal korvet kelas Ada hasil proyek MILGEM) dan rudal canggih seperti Atmaca (rudal anti-kapal jelajah). Investasi besar ini membawa kemandirian: lebih dari 70% kebutuhan alutsista Turki kini dipenuhi industri domestik, naik drastis dibanding dua dekade lalu. Secara ekonomi, lokasi Turki juga dimanfaatkan sebagai *hub* energi dan logistik. Proyek pipa gas *Trans-Anatolian Pipeline* (TANAP) yang mulai beroperasi 2018 menjadikan Turki koridor vital pengiriman gas dari Azerbaijan (Ladang Shah Deniz) ke Eropa, meningkatkan posisi tawar Ankara di bidang energi. Demikian pula, Istanbul dan pelabuhan Turki lain dikembangkan menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tengah.

d. **Modal Historis dan Soft Power:** Erdoğan tidak hanya mengandalkan *hard power*, tetapi juga *soft power* melalui modal historis dan budaya Turki. Ia kerap merujuk kejayaan Ottoman dalam retorika politik untuk membangkitkan kebanggaan nasional dan legitimasi historis. Partai AKP bahkan menggunakan slogan “*Osmanlı torunu*” (keturunan Ottoman) bagi

para pendukungnya, dan gaya kepemimpinan Erdoğan dibandingkan oleh pengkritiknya seperti “sultan Ottoman” modern. Selain itu, pemerintah Turki aktif mempromosikan narasi bahwa Turki adalah pelindung umat Muslim global – terlihat dari sikap vokal Erdoğan membela Palestina dan Yerusalem, juga dukungan Turki bagi Muslim di konflik Suriah, Rohingya, dll. Keputusan mengubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid (2020) dipandang sebagai simbol kebangkitan identitas Islam Turki dan sinyal bahwa Erdoğan ingin dilihat sebagai pemimpin dunia Islam.

e. **Di ranah budaya populer, eksport serial televisi Turki meledak dalam satu dekade terakhir.** Drama Turki (disebut *dizi*) digemari di Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara (termasuk Indonesia). Antara 2020–2022 permintaan global naik 44%, menjadikan Turki eksportir konten TV terbesar kedua di dunia setelah AS. Serial bernuansa sejarah Ottoman seperti *Diriliş: Ertuğrul* dan *Muhtesem Yüzyıl (Suleiman the Magnificent)* ditonton ratusan juta orang di puluhan negara, membangkitkan ketertarikan positif pada budaya Turki. Para pejabat pun sadar efeknya: “Serial Turki telah menjadi salah satu sarana soft power paling efektif bagi kami” ujar Egemen Bağış, mantan menteri di pemerintahan Erdoğan. Selain hiburan, Turki menggunakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan sebagai instrumen diplomasi. *Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA)* aktif mendanai proyek pembangunan, sekolah, dan rumah sakit di Afrika, Asia Tengah, dan Balkan, yang meningkatkan citra Turki di kalangan negara Muslim dan dunia berkembang. Kombinasi soft power ini budaya populer, bantuan luar negeri, diplomasi religius membentuk apa yang disebut analis sebagai “neo-Ottomanisme” baru: bukan penjajahan fisik, melainkan perluasan pengaruh melalui kedekatan budaya, agama, dan nostalgia sejarah. Hal ini turut menopang kebijakan luar negeri Turki yang lebih aktif dan ekspansif di bawah Erdoğan.

f. **Poros Maritim Dunia (Indonesia):** Visi *Global Maritime Fulcrum* Indonesia pertama kali dicetuskan Presiden Jokowi pada 2014. Visi ini merumuskan Indonesia sebagai poros strategi maritim Indo-Pasifik, dengan lima pilar utama: (1) membangun kembali budaya maritim Indonesia; (2) menjaga dan mengelola sumber daya laut (dengan fokus kedaulatan pangan laut melalui industri perikanan); (3) peningkatan infrastruktur dan konektivitas maritim (tol laut, pelabuhan dalam, industri galangan kapal, pariwisata bahari); (4) diplomasi maritim mengajak negara lain bekerjasama di bidang kelautan sembari mengatasi sumber konflik di laut seperti illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, pembajakan, dan pencemaran; serta (5) membangun kekuatan pertahanan maritim. Konsep ini sejalan dengan doktrin *Archipelagic Outlook* Indonesia pasca-Deklarasi Djuanda, yang menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan utuh. Secara kebijakan, telah terbit *Kebijakan Kelautan Indonesia (National Maritime Policy)* pada 2017 berisi rencana aksi implementasi Poros Maritim Dunia. Para akademisi dan praktisi umumnya mendukung doktrin ini, namun mencatat bahwa realisasinya masih memerlukan kerja keras: dari mulai modernisasi armada TNI-AL, penegakan hukum di laut (penangkapan kapal ilegal), pembangunan pelabuhan dan konektivitas tol laut, hingga penumbuhan budaya maritim di masyarakat. Di sinilah perbandingan dengan pengalaman Turki menjadi relevan – agar Indonesia dapat belajar dari negara lain yang tengah giat meningkatkan kekuatan maritimnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis strategis komparatif terhadap Turki dan Indonesia. Pertama, dilakukan pengumpulan data dan literatur mengenai strategi maritim Turki di bawah Erdoˆn. Sumber primer meliputi pidato-pidato Erdoˆn yang relevan (misalnya modifikasi semboyan kebijakan luar negeri seperti “*Yurtta sulk, cihanda sulk*” perdamaian di dalam negeri, perdamaian di dunia), dokumen resmi seperti Strategi Keamanan Nasional Turki, dan bahan doktrin maritim *Blue Homeland*. Selain itu, data kuantitatif tentang perkembangan industri pertahanan Turki diperoleh dari laporan SIPRI dan publikasi Kementerian Pertahanan Turki. Sumber sekunder berupa artikel jurnal dan analisis *think-tank* tentang politik luar negeri Erdoˆn, neo-Ottomanisme, dan dinamika keamanan kawasan.

Kedua, dikumpulkan data mengenai kebijakan Poros Maritim Indonesia. Sumber antara lain: Pidato Presiden Jokowi tentang Poros, *White Paper* atau Kebijakan Kelautan Indonesia 2017, Rencana Strategis TNI Angkatan Laut, dokumen Kementerian Koordinator Maritim, serta evaluasi implementasi visi maritim oleh para pengamat. Data dan literatur tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif-komparatif.

Analisis berfokus pada kesamaan dan perbedaan pendekatan Turki dan Indonesia dalam: (a) pemanfaatan posisi geostrategis untuk kepentingan nasional; (b) pembangunan dan penggunaan kekuatan militer maritim; (c) pemanfaatan modal historis dan soft power dalam diplomasi; serta (d) perumusan doktrin dan kebijakan maritim. Dari analisis ini diidentifikasi elemen-elemen kunci kesuksesan strategi Erdoˆn yang potensial *applicable* bagi Indonesia, serta faktor-faktor yang tidak dapat diadopsi mentah-mentah karena perbedaan konteks (misalnya, perbedaan aliansi: Turki anggota NATO, Indonesia berprinsip non-blok).

Hasil analisis dituangkan dalam pembahasan bertopik (a) hingga (e) sebagaimana tertera, diakhiri dengan simpulan yang merangkum pelajaran strategis bagi Indonesia dalam upaya menjadi Poros Maritim Dunia.

Analisis dan Pembahasan

a. Lokasi Geostrategis sebagai Aset Strategis

Turki di Bawah Erdoˆn: Posisi geografis Turki di persimpangan dua benua adalah anugerah strategis yang dimanfaatkan Erdoˆn sebagai modal diplomasi dan tawar-menawar. Turki mengontrol dua selat vital, Bosphorus dan Dardanella, yang menghubungkan Laut Hitam dan Mediterania. Keuntungan ini digunakan sebagai *leverage*: dalam krisis Suriah dan Ukraina, Turki dapat mengendalikan akses kapal perang asing sesuai Konvensi Montreux 1936. Selain itu, letak Turki di perbatasan Timur-Barat menjadikannya titik transit migrasi. Erdoˆn secara terang-terangan pernah memanfaatkan isu pengungsi Suriah sebagai kartu tawar dengan Uni Eropa misalnya pada 2016 Turki sepakat menahan arus pengungsi dengan imbalan bantuan dana, dan pada 2020 sempat “membuka pintu” migran ke Eropa untuk menekan EU. Taktik ini menunjukkan pemanfaatan posisi geografis untuk kepentingan politik.

Di sisi militer, Turki juga menggunakan lokasinya sebagai tuan rumah pangkalan strategis bagi sekutu namun dengan syarat menguntungkan Ankara. Contohnya Pangkalan Udara İncirlik di Turki selatan, yang menampung pesawat dan personel NATO/AS serta sekitar 50 bom nuklir AS. İncirlik telah menjadi penjamin kedekatan Turki-AS, tetapi Erdoˆn tak segan mengancam akan menutup aksesnya ketika hubungan bilateral tegang (misal saat AS mempertimbangkan sanksi atas pembelian S-400 Rusia pada 2019). Artinya, keberadaan

pangkalan asing di Turki dijadikan alat tawar oleh Erdogan “akses untuk keamanan Barat ditukar dengan konsesi politik bagi Ankara”.

Lebih jauh, Erdogan berupaya meningkatkan kontrol Turki atas lalu lintas maritim di wilayahnya. Salah satu proyek ambisiusnya adalah *Kanal İstanbul*, rencana kanal buatan paralel Bosphorus. Meski kontroversial, kanal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan rute kapal (dan berpotensi menghindari beberapa batasan Montreux), yang pada akhirnya memperkuat posisi Turki dalam mengatur perdagangan maritim lewat wilayahnya. Singkatnya, Erdogan sadar betul bahwa geografi adalah aset: letak Turki yang “di tengah-tengah” dimanfaatkan dalam negosiasi, baik soal migrasi, aliansi militer, maupun ekonomi energi.

Secara geografis, Indonesia juga memiliki aset luar biasa – sebagai negara kepulauan terbesar dunia yang membentang di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta diapit dua benua. Terdapat tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang diakui internasional sebagai jalur pelayaran utama melalui perairan Nusantara. *Choke point* penting berada di wilayah kita: Selat Malaka (jalur tersibuk kedua dunia, dilalui 25% perdagangan dunia dan 70% impor minyak Asia), Selat Sunda, dan Selat Lombok. Namun, apakah Indonesia telah memanfaatkan keunggulan geostrategis ini secara optimal? Selama ini Indonesia cenderung menjalankan peran pasif sebagai *gatekeeper* yang menjamin keamanan dan kelancaran pelayaran internasional di selat-selat tersebut, tanpa banyak insentif geopolitik atau ekonomi langsung. Sebagai contoh, meski ribuan kapal dagang melintasi Selat Malaka tiap tahun, Indonesia (bersama Malaysia dan Singapura) tidak memungut semacam “*toll fee*” atas hak lintas itu karena patuh pada prinsip *freedom of navigation* UNCLOS. Kontribusi Indonesia lebih berupa menjaga keamanan: patroli terkoordinasi seperti Malacca Strait Patrols telah dilakukan sejak 2004 oleh TNI-AL bersama TLDL Malaysia, RSN Singapura, dan kemudian Thailand, untuk mencegah perompakan. Hasilnya efektif menekan bajak laut dan mengamankan jalur perdagangan. Meski hal ini penting, pendekatannya masih defensif dan belum menjadikan posisi strategis sebagai alat tawar diplomasi atau ekonomi.

Pelajaran dari Turki mendorong Indonesia untuk lebih proaktif memanfaatkan lokasinya. Bukan berarti Indonesia meniru ancaman ala Erdogan, tetapi Indonesia dapat memainkan peran strategis sebagai penggerak kerja sama maritim kawasan. Misalnya, Indonesia bisa menginisiasi forum diplomasi navigasi: ASEAN *Maritime Forum* bisa diperkuat untuk membahas aturan lalu lintas damai dan pencegahan insiden di kawasan. Indonesia juga dapat menawarkan diri sebagai mediator atau tuan rumah dialog konflik maritim, misal sengketa Laut Cina Selatan memanfaatkan posisinya yang netral dan strategis di tengah Indo-Pasifik. Selain itu, posisi geografis Indonesia berpotensi dijadikan *logistic hub* bagi operasi kemanusiaan atau misi perdamaian internasional. Contohnya, pangkalan Angkatan Laut di Kepulauan Natuna atau Sabang dapat dikembangkan menjadi titik sandar bagi kapal perang berbagai negara untuk latihan bersama atau bantuan bencana, sehingga menaikkan profil Indonesia di kancan maritim. Upaya diplomasi lainnya, Indonesia bisa menggalang dukungan agar setiap kapal yang melintasi ALKI mematuhi aturan lingkungan (mencegah pencemaran) dan keamanan (memerangi penyelundupan), hal ini meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola maritim tanpa langkah konfrontatif.

Intinya, Indonesia perlu melihat geografi bukan sekadar anugerah pasif, tapi aset yang dinegosiasikan. Pengalaman Erdogan menunjukkan nilai strategis selat dan lokasi persimpangan. Indonesia dapat mengonversi posisi silang nusantaranya menjadi pengaruh

dengan cara elegan: menawarkan jasa baik di bidang keamanan maritim, menetapkan standar aturan pelayaran regional, serta membangun citra sebagai “penyeimbang maritim” di antara kekuatan besar. Dengan demikian, lokasi Indonesia benar-benar berperan dalam doktrin Poros Maritim, bukan hanya realitas geografis belaka.

b. Kekuatan Militer dan Kemandirian Industri Pertahanan

Kebangkitan kekuatan militer Turki dalam 15 tahun terakhir sangat kentara. Erdogan mendorong kebijakan *“Turkey First”* dalam industri pertahanan mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Hasilnya, anggaran pertahanan dialokasikan untuk pengembangan drone tempur, kendaraan lapis baja, kapal perang, pesawat, hingga rudal. Program andalan seperti drone Bayraktar TB2 telah mengharumkan nama Turki di medan perang modern. Saat Azerbaijan mengalahkan Armenia (Perang Nagorno-Karabakh 2020), misalnya, drone TB2 berperan menghancurkan artileri dan sistem udara lawan, hingga menjadi *game changer*. Demikian pula di Libya dan Suriah, intervensi militer Turki yang sukses sebagian besar berkat dukungan wahana tempur nirawak dan peralatan buatan sendiri. Ini menandai kemampuan Turki memproyeksikan kekuatan regional sesuatu yang dulu sulit dibayangkan tanpa bantuan senjata negara lain. Erdogan juga memanfaatkan operasi militer terbatas untuk meningkatkan pamor Turki: operasi *“Euphrates Shield”* (2016) dan *“Peace Spring”* (2019) di Suriah utara melawan ISIS dan milisi Kurdi, intervensi di Libya membantu Pemerintah Tripoli, serta dukungan militer ke Qatar (pangkalan dibuka 2017) dan Somalia (misi pelatihan) memperlihatkan Turki sanggup bertindak di luar batas teritorialnya. Aksi-aksi ini mengirim sinyal kuat bahwa Turki adalah *net security provider* di kawasannya.

Pencapaian tersebut ditopang oleh pesatnya pertumbuhan industri pertahanan domestik. Selama 20 tahun terakhir, nilai output industri pertahanan Turki meningkat 10 kali lipat. Ekspor pertahanan pun melonjak hingga mencapai rekor US\$4,3 miliar pada 2022, dengan target \$6 miliar tahun 2023. Produk unggulan, seperti Bayraktar TB2, telah dijual ke 27+ negara per 2022 (bertambah menjadi 35 negara di 2023). Turki kini menempati pangsa 1,7% eksport senjata global. Selain UAV, Turki mengekspor kapal perang (misal Pakistan membeli 4 korvet kelas Ada, Filipina memesan LPD, Malaysia membeli drone Anka), serta tengah memasarkan helikopter serang ATAK dan jet latih Hürjet. Keberhasilan eksport ini tak lepas dari diplomasi pertahanan Erdogan dalam kunjungan kenegaraan ia sering mempromosikan produk Turki, bahkan membantu negosiasi pembiayaan bagi pembeli. Di sisi lain, Turki juga berani mengambil keputusan strategis meski kontroversial di aliansi: pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia (2019) menunjukkan tekad Erdogan memperluas sumber alutsista demi kepentingan nasional, meski akibatnya dikeluarkan dari program F-35 NATO. Keputusan ini mencerminkan prinsip *strategic autonomy* Turki: tetap di NATO, tapi kebijakan pertahanan tidak boleh didikte sepenuhnya oleh Barat.

Bagi Indonesia, ambisi menjadi Poros Maritim harus didukung *kekuatan militer maritim yang kredibel*. Saat ini, TNI Angkatan Laut terus berupaya modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Namun, kualitas dan kuantitas armada masih tertinggal dibanding luas wilayah perairan yang harus dijaga. Indonesia memiliki sekitar 8 fregat/korvet, 5 kapal selam, dan belasan kapal patroli ocean-going jumlah yang kemungkinan belum cukup untuk sepenuhnya mengamankan hampir 6 juta km² wilayah ZEE dan perairan nusantara. Belajar dari Turki, ada dua hal utama: (1) kemandirian industri pertahanan, dan (2) penggunaan terbatas kekuatan secara strategis.

Pertama, kemandirian industri pertahanan maritim. Indonesia sebenarnya punya dasar: galangan kapal PT PAL di Surabaya mampu membangun kapal pendarat tangki (LPD) dan fregat ringan, PT Dirgantara Indonesia membuat pesawat patroli maritim CN-235, PT Pindad untuk senjata marinir, dll. Namun kapabilitas ini perlu lompatan teknologi. Turki menunjukkan pentingnya investasi R&D jangka panjang. Misalnya, untuk drone maritim dan sistem senjata anti-kapal. Turki mengembangkan rudal anti-kapal Atmaca yang setara Exocet/Harpoon, kini mulai dipasang di frigatnya. Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dengan dua cara: kolaborasi dan *technology transfer*. Langkah baik sudah dimulai misalnya pada 2025 diumumkan kerjasama PT Pindad dengan Roketsan Turki untuk *joint production* rudal Atmaca di Indonesia. Indonesia menjadi pembeli asing pertama Atmaca dengan order 45 unit, diikuti Malaysia. Ini contoh konkret mengambil teknologi luar demi peningkatan kemampuan domestik. Ke depan, proyek serupa bisa diperluas (misal pengembangan *unmanned surface/sub-surface vehicles*, satelit penginderaan maritim, dsb.). Intinya, *vis-à-vis* Turki, Indonesia perlu memperkuat ekosistem industri pertahanan maritim melibatkan BUMN strategis, swasta, universitas agar kebutuhan kapal patroli, rudal anti kapal, drone intai, dan sistem radar pantai dapat dipenuhi sendiri. Dengan kemandirian, diplomasi Indonesia pun lebih leluasa (tidak terkendala embargo negara penjual ketika ada krisis).

Kedua, penggunaan terbatas kekuatan militer untuk pengaruh diplomatik. Militer Indonesia sejak Orde Baru jarang dilibatkan dalam misi ekspedisioner di luar negeri kecuali pasukan penjaga perdamaian PBB. Doktrin militer Indonesia defensif dan berprinsip tidak agresif. Namun, untuk mendukung visi poros maritim, TNI-AL bisa lebih aktif hadir di kawasan (tentu dalam kerangka damai). Pelajaran Turki: pengrahan militer (secara terbatas) dapat meningkatkan posisi tawar. Indonesia dapat meningkatkan partisipasi dalam latihan gabungan multinasional maritim (seperti RIMPAC, CARAT, Komodo Exercise yang sudah dijalankan), atau bahkan memimpin latihan *maritime peacekeeping* antarnegara. Selain itu, Indonesia bisa mempertimbangkan penempatan satuan tugas maritim dalam misi PBB – misal kapal patroli Indonesia di UNIFIL Lebanon atau anti-pembajakan di Somalia. Kehadiran ini selain melatih kemampuan, juga memperkuat profil Indonesia sebagai negara maritim yang berkontribusi pada keamanan global. Langkah-langkah “proyeksi terbatas” ini tidak melanggar prinsip bebas-aktif, justru sejalan dengan semangat *active engagement*.

Hal lain, diversifikasi sumber alutsista seperti dilakukan Turki juga relevan. Indonesia sudah menjalankan “strategi keseimbangan” beli alutsista: ada Sukhoi dan Yak-130 dari Rusia, F-16 dan Apache dari AS, kapal selam dari Korea Selatan, kapal patroli dari Perancis, radar dari Italia, dan terbaru kerja sama jet KF-21 Boramae dengan Korea. Kebijakan ini perlu diteruskan untuk memastikan Indonesia tidak tergantung satu pihak. Namun, tantangannya adalah pendanaan dan konsistensi politik. Industri pertahanan lokal pun harus dilibatkan agar ada transfer teknologi setiap pembelian.

Singkatnya, kekuatan maritim Indonesia harus ditingkatkan agar visi Poros Maritim tidak sebatas retorika. Peningkatan ini bukan untuk agresi, melainkan untuk *deterrence* dan daya tawar. Turki menunjukkan, dengan militer yang disegani dan perlengkapan buatan sendiri, sebuah negara ukuran menengah bisa punya suara besar di kawasannya. Indonesia dengan potensi ekonomi lebih besar seharusnya bisa melakukan hal serupa di Indo-Pasifik, tentu disesuaikan karakter kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan kerja sama.

c. Modal Historis dan Diplomasi Budaya

Turki (Erdoğan): Warisan sejarah Kesultanan Utsmaniyah (Ottoman) merupakan modal intangible yang pandai dimanfaatkan Erdoğan dalam politik dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, referensi kejayaan Ottoman dipakai untuk mengobarkan nasionalisme religius. Di era Ottoman, Turki memimpin dunia Muslim selama berabad-abad; narasi ini dibangkitkan Erdoğan untuk membangun identitas Turki modern yang bangga dengan Islam dan masa lalunya, berbeda dari paradigma sekuler Kemalisme. Secara luar negeri, *neo-Ottomanism* ala Erdoğan tercermin pada kepedulian Turki terhadap bekas wilayah pengaruh Ottoman: Timur Tengah, Balkan, Afrika Utara. Erdoğan mengambil posisi vokal dalam isu-isu dunia Islam ia mengecam keras pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, rutin mengangkat isu Palestina di forum PBB, mendukung Pemerintah Muslim Brotherhood di Mesir (sebelum kudeta 2013), hingga menjadi tuan rumah pertemuan ulama internasional. Semua ini mengirim pesan bahwa Turki siap memimpin dunia Islam. Konversi Museum Hagia Sophia menjadi masjid pada Juli 2020 adalah klimaks simbolisnya: Erdoğan menandatangani dekrit itu di depan kamera, menegaskan “keadautan Turki” atas peninggalan sejarah tersebut dan mengukuhkan identitas negara yang lebih Islami. Analis mencatat langkah ini sebagai upaya Erdoğan mengklaim posisi pemimpin Muslim global. Reaksi dunia memang terbagi, tapi basis umat di banyak negara melihat Turki sebagai pembela kepentingan Islam di panggung dunia.

Soft power budaya juga menjadi senjata ampuh Turki. Industri hiburan Turki (film dan musik) berkembang pesat dan diekspor besar-besaran. Serial TV Turki, misalnya, ditonton luas di Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Di Indonesia, drama Turki pernah populer di layar kaca (“Elif”, “Abad Kejayaan”/Suleiman, dll.). Menurut laporan, Turki kini eksportir serial TV terbesar kedua di dunia dengan 140+ negara pemirsa dan 650 juta penonton global. Serial-serif tersebut membawa nilai budaya Turki mulai dari gaya busana, arsitektur, hingga nilai-nilai keluarga Muslim moderat memasuki ruang keluarga di berbagai benua. Ini menciptakan *cultural affinity* yang pada gilirannya mempermudah diplomasi. Pejabat Turki secara terang mengakui efek ini: “*Tidak ada harga yang sebanding dengan mentransfer budaya dan struktur sosial kita ke luar negeri melalui serial*”, kata Direktur TRT Ibrahim Şahin. Selain itu, Turki memanfaatkan hubungan sejarah Ottoman dengan banyak kawasan: di Balkan dan Asia Tengah, Turki dianggap “saudara tua” karena ikatan etnis Turkic dan memori Ottoman yang relatif positif (bandingkan dengan imperialisme Eropa). Erdoğan mengunjungi puluhan negara Afrika dan Asia, meresmikan masjid megah (misal di Somalia, 2019), membuka sekolah Turki, dan mendirikan kantor TIKA di lebih 50 negara. Program beasiswa Türkiye Burslari juga menarik ribuan pelajar asing setiap tahun. Semua inisiatif ini menumbuhkan goodwill terhadap Turki. Berkat itu, meski Turki bukan negara besar secara ekonomi, pengaruh lunaknya di dunia Islam cukup besar – sering dibandingkan dengan “China di dunia Muslim” dari sisi pembangunan jaringan pengaruh non-militer.

Indonesia: Sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan pewaris peradaban bahari (Sriwijaya, Majapahit), Indonesia sebenarnya memiliki modal historis-budaya yang dapat diangkat untuk mendukung visi maritimnya. Selama ini, diplomasi Indonesia sering bertumpu pada identitas sebagai negara Muslim demokratis dan pemimpin ASEAN. Namun, aspek sejarah maritim Nusantara belum banyak dijadikan elemen diplomasi budaya. Indonesia punya cerita kejayaan maritim: Kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 s.d 13) menguasai perdagangan maritim Asia Tenggara, Majapahit (abad ke-14) dengan armada laut kuat mempersatukan Nusantara. Narasi

ini bisa diangkat di forum internasional untuk menegaskan bahwa Indonesia secara historis adalah bangsa bahari yang damai dan makmur. Misalnya, dalam pidato global, pemimpin Indonesia dapat mengutip Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha maritim, atau Majapahit dengan *Sumpah Palapa*-nya mempersatukan nusantara melalui laut. Ini akan membangun kebanggaan nasional dan pengakuan internasional atas identitas maritim Indonesia, seraya mengisi kekosongan “grand narrative” dalam visi Poros Maritim.

Dalam diplomasi budaya kontemporer, Indonesia dapat belajar dari pendekatan Turki: projek budaya populer. Industri kreatif Indonesia (film, musik) memang belum setenar K-Pop atau dizi Turki, tapi kita punya kekayaan budaya maritim (tarian tradisional bertema laut, kapal pinisi yang diakui UNESCO, dsb.) yang dapat dipromosikan lebih agresif. Misalnya, membuat serial atau film tentang sejarah pelaut Bugis atau Laksamana Malahayati, lalu menawarkannya ke pasar global. Atau menggelar festival maritim internasional (balap perahu tradisional, layar rempah napak tilas rute perdagangan kuno) sebagai agenda pariwisata tahunan. Ini akan menarik wisatawan sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa bahari.

Tak kalah penting adalah diplomasi keumatan. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, punya legitimasi moral di dunia Islam. Selama ini Indonesia aktif di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendukung Palestina, memprakarsai solusi isu Rohingya, dll. Namun Indonesia cenderung low profile dan enggan memimpin terang-terangan. Padahal, visi Poros Maritim bisa dikaitkan dengan inisiatif kolektif di kalangan negara Muslim maritim. Misalnya, Indonesia bisa mengajak negara-negara OKI yang berbatasan laut membentuk *Islamic Maritime Cooperation* untuk isu keamanan laut (anti pembajakan, pencurian ikan) dan bantuan kemanusiaan (penanganan pengungsi di laut). Contoh, kerja sama dengan Malaysia, Bangladesh, Turki, dalam penanganan pengungsi Rohingya di Samudra Hindia. Langkah semacam ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin bermoral (*normative leader*) tanpa terkesan hegemonik.

Indonesia juga dapat memanfaatkan platform budaya Islam moderatnya seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam *soft diplomacy*. Ulama-ulama Indonesia dikenal toleran dan berpengaruh di Asia Tenggara; mengirim mereka dalam misi perdamaian (seperti yang pernah dilakukan ke Afghanistan) atau pertukaran tokoh lintas negara dapat meningkatkan *goodwill*. Ini mirip pendekatan Turki memakai Diyanet (Direktorat Urusan Agama) untuk menjalin hubungan dengan komunitas Muslim di diaspora.

Singkatnya, pelajaran dari Turki adalah bahwa identitas sejarah dan budaya bila dikelola dengan baik bisa menjadi elemen kekuatan nasional. Indonesia dapat menonjolkan kembali jati diri bangsa bahari sebagai keturunan pelaut ulung dan penjaga peradaban maritim di persimpangan samudra. Ditambah, sebagai bangsa Muslim besar yang menjunjung demokrasi dan perdamaian, Indonesia punya *soft power appeal* yang unik. Kombinasi ini bisa dipakai untuk membangun koalisi, mempengaruhi opini global, dan memenangkan hati negara lain, sehingga mendukung tercapainya kepentingan maritim Indonesia di forum internasional.

d. Adaptasi ke Doktrin Pertahanan Maritim Indonesia

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa elemen strategi Erdogan yang dapat diadaptasi (dengan penyesuaian) ke dalam doktrin dan kebijakan pertahanan maritim Indonesia:

- 1) **Kehadiran Regional Aktif (“Active Regional Presence”):** Seperti Turki yang meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di Mediterania Timur melalui patroli dan latihan (untuk menegaskan doktrin Mavi Vatan), Indonesia perlu meningkatkan

intensitas kehadiran TNI-AL di kawasan strategisnya. Ini bisa diwujudkan dengan patroli rutin di perairan Natuna Utara (Zona ekonomi eksklusif yang diklaim China secara sepihak sebagai bagian *nine-dash line*), intensifikasi operasi keamanan di Laut Sulu dan perbatasan Ambalat, serta peningkatan latihan bilateral/multilateral di Samudra Hindia. Latihan multilateral Komodo Exercise yang diinisiasi Indonesia bisa diperluas skalanya, melibatkan lebih banyak negara untuk misi *non-combatant evacuation*, *HADR* (bantuan kemanusiaan dan bencana), hingga patroli bersama anti-penyalundupan. Kehadiran aktif ini akan memberikan pesan tegas bahwa Indonesia serius dengan visinya sebagai poros maritim – bahwa kita hadir untuk menjaga stabilitas dan hukum di laut kawasan. Dengan seringnya kapal TNI-AL terlihat berpatroli, misalnya di Natuna, diharapkan dapat mencegah pelanggaran kedaulatan (efek *deterrence* terhadap kapal asing ilegal). Langkah ini sejalan dengan pilar diplomasi maritim, di mana Indonesia mengajak negara lain memastikan laut bebas konflik. Indonesia pun bisa memimpin prakarsa *coordinated patrol* tambahan, misalnya di Laut Natuna bersama negara ASEAN lain, mirip Malacca Patrol.

2) Pembangunan Industri Pertahanan Maritim Nasional: Mencontoh tekad Turki mencapai swasembada alutsista, Indonesia perlu memasukkan agenda *kemandirian alutsista maritim* dalam doktrin pertahanannya. Sudah disinggung di sub-bagian (b), disini penekanan kebijakan: Pemerintah harus berani menggelontorkan investasi R&D dan memberikan insentif pada BUMN dan industri swasta yang terlibat produksi alutsista maritim. Program *offset* dari setiap pembelian kapal atau pesawat asing wajib dimaksimalkan – misal membeli fregat dari Italia atau Inggris disyaratkan transfer teknologi pembuatan sistem senjata ke PT PAL. Begitu pula jika mengimpor drone maritim, harus ada kerjasama pembuatan komponen di dalam negeri. Dalam jangka menengah, Indonesia perlu fokus pada beberapa *core competency*: (a) pembangunan kapal permukaan (frigat, OPV) – PT PAL sudah berpengalaman; (b) produksi rudal anti kapal jelajah dapat kerjasama lisensi seperti dengan Roketsan Turki, lalu kembangkan varian lokal; (c) pengembangan UAV dan USV (kapal permukaan nirawak) untuk patroli laut kerjasama dengan produsen seperti Baykar atau perusahaan Eropa. Hasil akhir yang diinginkan: armada TNI-AL di masa depan dilengkapi mayoritas alutsista buatan nasional, sehingga biaya operasi lebih murah dan keberlanjutan logistik terjamin. Langkah ini akan menjadikan Indonesia tidak hanya Poros Maritim secara geopolitik, tapi juga *arsenal* teknologi maritim regional yang mandiri.

3) Aliansi dan Kerjasama Fleksibel (*Flexible Alignments*): Indonesia memang berpegang pada politik luar negeri bebas-aktif dan tidak beraliansi militer. Namun, dalam konteks maritim, Indonesia bisa membentuk kemitraan keamanan fleksibel sesuai isu. Contoh: untuk memberantas Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di kawasan, Indonesia bisa memimpin *task force* bersama negara ASEAN yang terdampak (Malaysia, Vietnam, Filipina) serta menggandeng armada Jepang/AS/Australia yang memiliki kapasitas *maritime domain awareness*. Ini bukan aliansi formal, melainkan *coalition of the willing* berbasis kepentingan spesifik. Turki melakukan hal serupa: meski anggota NATO, Turki menjalin kerjasama maritim juga dengan Rusia (patroli Laut Hitam), dan armada China (latihan joint di Mediterania). Indonesia bisa meniru pragmatisme ini tentu dengan kehati-hatian diplomatik. Sudah ada contoh sukses:

Malacca Strait Patrol (Indonesia-Malaysia-Singapura-Thailand) sejak 2004 efektif mengamankan selat tersibuk dunia. Pola ini bisa diaplikasikan ke Selat Sunda/Lombok (patroli Indonesia-Australia misalnya untuk keamanan ALKI II dan III), ataupun ke Laut Sulu (patroli trilateral Indo-Malaysia-Filipina melawan terorisme maritim). Fleksibilitas kerjasama juga berarti Indonesia tidak antipati terhadap konsep-konsep baru seperti Quad (AS-Jepang-India-Australia) selama menyangkut keamanan maritim global. Misalnya, Indonesia bisa berperan sebagai tuan rumah dialog antara ASEAN dan Quad untuk sinkronisasi aturan *freedom of navigation*. Dengan mengambil inisiatif, Indonesia tetap memegang kendali narasi dan tak terjebak *zero-sum game* kekuatan besar.

4) Sinergi Militer-Sipil dalam Keamanan Maritim: Keamanan maritim di Indonesia bukan semata urusan TNI-AL, melainkan melibatkan banyak instansi sipil: Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polairud, Bea Cukai, KKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), dan pemerintah daerah pesisir. Saat ini, koordinasi antar lembaga terkadang tumpang tindih. Belajar dari Turki yang memiliki Penjaga Pantai (Sahil Güvenlik) cukup kuat di bawah Kementerian Dalam Negeri namun terintegrasi dengan Angkatan Laut saat krisis – Indonesia perlu membangun *mekanisme komando dan kendali terpadu* untuk keamanan maritim. Doktrin pertahanan maritim Indonesia sebaiknya menegaskan pembagian peran: TNI-AL fokus pada ancaman militer dan high-end (misal kapal asing bersenjata, ancaman kedaulatan), sementara Bakamla sebagai *coast guard* utama menangani penegakan hukum sipil di laut (*illegal fishing*, penyelundupan, SAR). Namun keduanya harus bisa saling mendukung dan bertukar informasi real-time. Langkah konkret: membangun *Maritime Fusion Center* nasional yang mengumpulkan data AIS kapal, citra satelit, laporan intelijen dari semua instansi, sehingga situational awareness menyeluruh. Ini sudah dicetuskan melalui Bakamla, tapi perlu dipercepat. Kemudian, menyelenggarakan latihan gabungan rutin antara Bakamla, TNI-AL, Polairud dan KKP, agar prosedur operasi di lapangan selaras. Sinergi militer-sipil ini penting karena tantangan maritim Indonesia kebanyakan bersifat non-tradisional dan berdimensi hukum (*IUU fishing* contohnya membutuhkan proses hukum, tidak cukup ditenggelamkan kapalnya saja). Dengan kerja sama erat, “total force” maritim Indonesia akan lebih efektif dan kredibel, mendukung visi poros maritim secara utuh.

e. **Batasan dan Perbedaan: Turki vs Indonesia**

Meski banyak pelajaran bisa diambil, penting disadari bahwa situasi Turki dan Indonesia memiliki perbedaan mendasar yang membatasi penerapan langsung strategi Erdogan di Indonesia:

1) Konteks Ancaman dan Aliansi: Turki berada di lingkungan konflik bersenjata tinggi. Selama satu dekade terakhir Turki terlibat perang saudara Suriah (berdasarkan langsung), ancaman teror ISIS dan milisi Kurdi, sengketa eksplorasi gas dengan Yunani di Mediterania, hingga perang di Kaukasus. Artinya, militer Turki teruji dalam pertempuran intens dan mendapat justifikasi publik untuk aksi militer luar negeri. Sebaliknya, Indonesia relatif berada di lingkungan yang damai tidak ada perang langsung di sekitar kita (meski ada ketegangan Laut Cina Selatan). Ancaman Indonesia lebih banyak bersifat non-tradisional: pencurian ikan, penyelundupan narkoba, pembajakan (sebelumnya di Selat Malaka), dan potensi bencana alam. Konflik bersenjata antar negara di Asia Tenggara nyaris tak ada pasca 1970-an. Perbedaan ini

mempengaruhi *mindset* penggunaan kekuatan. Kebijakan luar negeri Indonesia berprinsip menyelesaikan sengketa secara damai (sesuai Piagam PBB dan konsep ASEAN Way). Indonesia tidak memiliki musuh tradisional yang jelas, berbeda dengan Turki yang melihat rezim Assad di Suriah atau kelompok PKK sebagai musuh yang harus diperangi. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu dan tidak akan meniru gaya militeristik Turki yang ofensif. Mengirim kapal perang jauh ke luar kawasan untuk unjuk kekuatan, apalagi terlibat konfrontasi militer, bukan pilihan bagi Jakarta kecuali dalam misi PBB.

2) Politik Luar Negeri dan Nilai Nasional: Turki di bawah Erdogan cenderung menjalankan politik luar negeri assertif, bahkan konfrontasional jika diperlukan (contoh: sengaja melanggar sanksi AS demi beli S-400, atau retorika keras terhadap Israel dan Saudi). Indonesia punya doktrin *bebas-aktif* yang menekankan tidak memihak blok dan aktif menciptakan perdamaian. Jati diri Indonesia berdasarkan Pancasila, khususnya sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-4 (Kerakyatan dalam permusyawaratan) menuntun pendekatan yang mengutamakan diplomasi, dialog, dan kepemimpinan yang inklusif. Artinya, Indonesia tidak berniat menjadi hegemon atau “polisi kawasan”. Poros Maritim Dunia versi Indonesia harus diwujudkan melalui kepemimpinan kolektif yang diterima negara tetangga, bukan melalui dominasi militer. Berbeda dengan Turki yang kadang dituduh tetangganya “neo-imperial” karena terlibat di Suriah dan Irak, Indonesia justru harus menghindari persepsi seperti itu di ASEAN. Maka, semua adaptasi pelajaran Turki harus disaring agar selaras dengan karakter Indonesia.

3) Kemampuan Ekonomi: Perekonomian Turki \$800 miliar dengan industri manufaktur maju mampu mendukung ambisi militer mereka (meski belakangan mengalami krisis mata uang). Indonesia, meski PDB \$1,1 triliun, masih berjuang meningkatkan basis industri dan teknologi. Untuk mencapai level kemandirian ala Turki, Indonesia perlu investasi besar dan reformasi edukasi teknologi, yang hasilnya mungkin baru terlihat jangka menengah-panjang. Ini perlu konsistensi lintas rezim, tidak bisa instan.

4) Posisi Hukum Internasional: Turki dan Indonesia sama-sama anggota G20, namun Turki lebih terikat aliansi (NATO) yang memberi payung keamanan, sedangkan Indonesia non-blok. Kelebihannya, Indonesia lebih leluasa bermanuver tanpa tekanan komitmen aliansi. Kekurangannya, Indonesia harus swadaya penuh dalam menjaga keamanan wilayahnya. Dalam sengketa seperti Laut Cina Selatan, Turki bukan pihak klaim sehingga bebas berperan apa saja, sedangkan Indonesia meski bukan claimant tetap berkepentingan langsung (Natuna). Pendekatan kita harus hati-hati agar tegas soal kedaulatan tapi tetap tidak memihak blok AS atau China. Ini tantangan unik yang tak dialami Turki di konteks yang sama.

5) Budaya Strategis: Budaya strategis Turki dibentuk oleh sejarah panjang militer (Ottoman) dan identitas nasionalis-sekular kemudian islami. Militer sangat sentral di sana (dulu sebagai penjaga sekularisme, kini sebagai penjaga kepentingan Turki baru). Indonesia, militer tentu penting tapi pasca reformasi peran militer lebih ke pertahanan, tidak dominan di politik. Budaya maritim Indonesia sendiri sempat surut di abad 20 seiring orientasi darat pada era kolonial dan Orde Baru. Membangkitkan *maritime*

mindset masyarakat Indonesia butuh waktu – misal pendidikan maritim di sekolah, pembangunan sentra ekonomi kelautan agar orang kembali “melaut”. Ini beda dengan Turki di mana publiknya kini bangga dengan kapal perang UAV canggih, karena merasa ancaman di sekelilingnya nyata.

Kesadaran akan batasan di atas penting agar kita tidak salah kaprah. Indonesia tidak perlu “menjadi Turki” atau memproyeksikan kekuatan secara agresif. Indonesia cukup mengambil esensi: proaktif, mandiri, percaya diri dalam memanfaatkan sumber daya geostrategis, namun tetap dalam koridor prinsip perdamaian. Dengan kata lain, *proaktif bukan provokatif*. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebaiknya berperan sebagai penyeimbang yang menenteramkan (stabilizer), bukan kekuatan revisionis yang menimbulkan kecemasan. Ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 agar Indonesia ikut serta menciptakan perdamaian dunia.

Sebagai contoh konkret, Indonesia bisa memimpin inisiatif kerja sama *Coast Guard Asia Tenggara* untuk SAR dan antipencurian ikan langkah proaktif tapi tak militeristik. Atau mengembangkan Pusat Keamanan Maritim IORA (Association of Indian Ocean Rim) yang kebetulan Indonesia dirikan pada 2018, menjadi pusat pelatihan negara Samudra Hindia untuk penanggulangan kejahatan di laut. Inisiatif demikian memperkuat posisi Indonesia sebagai *leading maritime nation* tanpa menimbulkan resistensi. Nilai-nilai Pancasila memastikan Indonesia membangun poros maritim yang berkeadilan, menyejahterakan, dan inklusif.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, Turki berhasil memadukan berbagai sumber daya geostrategis posisi geografis unik, kekuatan militer yang dibangun mandiri, serta warisan historis-budaya Ottoman menjadi kekuatan terpadu untuk mendongkrak peran dan pengaruhnya sebagai kekuatan regional. Erdoğan secara efektif memanfaatkan letak strategis Turki (di persimpangan Eropa-Asia, mengontrol selat vital) sebagai alat tawar diplomatik dan pertahanan. Ia juga mendorong kemandirian industri pertahanan Turki, yang menghasilkan lompatan teknologi (contoh: drone Bayraktar) dan meningkatkan daya gentar militer Turki di kawasan. Di saat yang sama, Erdoğan mengkapitalisasi modal sejarah Ottoman dan soft power melalui diplomasi kultural, serial televisi, bantuan kemanusiaan, dan retorika solidaritas Islam untuk membangun pengaruh tanpa kekuatan militer langsung. Konvergensi dari unsur-unsur geostrategis tersebut menjadikan Turki di era Erdoğan mampu memainkan peran di luar proporsi ukuran ekonominya, menjelma “*pemain tengah*” (middle power) yang disegani baik oleh kawan maupun lawan.

Bagi Indonesia, temuan ini menyiratkan pelajaran berharga. Indonesia memiliki posisi geostrategis yang tak kalah penting berada di jantung Indo-Pasifik dan mengendalikan jalur pelayaran global serta sumber daya alam dan demografi besar. Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada dasarnya selaras dengan gagasan memadukan keunggulan geografis, kekuatan pertahanan maritim, dan identitas kebaharian untuk kepentingan nasional. Pelajaran utama dari Turki adalah pentingnya membangun *sea power* yang tangguh dan mandiri. Tanpa armada laut dan perangkat pertahanan maritim yang kuat, sulit bagi Indonesia mengklaim peran poros di kawasan maritim. Investasi pada industri kapal, pesawat, rudal, dan teknologi maritim harus ditingkatkan agar Indonesia memiliki otonomi strategis. Selain itu, *political will* untuk proaktif di kancang maritim juga diperlukan misalnya memimpin kerja sama keamanan maritim regional, terlibat aktif menyelesaikan sengketa maritim secara damai, dan menjadi pionir dalam agenda ekonomi kelautan berkelanjutan.

Tentu, adaptasi harus memperhatikan konteks Indonesia. Berbeda dengan Turki, Indonesia menolak politik kekuatan dan lebih memilih pendekatan damai. Ini bukan kelemahan, justru kekuatan moral Indonesia. Maka, ketika mengadopsi unsur “konvergensi geostrategis”, Indonesia tetap berpegang pada prinsip Pancasila dan *bebas-aktif*. Artinya, Indonesia membangun kekuatan maritim bukan untuk ekspansi atau provokasi, tetapi untuk melindungi kepentingan nasional, menegakkan hukum internasional, dan memberikan manfaat bagi stabilitas kawasan. Dengan begitu, Indonesia dapat mewujudkan *Global Maritime Fulcrum* yang autentik: poros maritim yang berpengaruh karena kekuatan dan diplomasi cerdasnya, namun sekaligus berkeadaban karena senantiasa mengedepankan perdamaian dan kerja sama. Itulah peran yang pantas bagi Indonesia negara kepulauan terbesar, pewaris kejayaan bahari, dan pendukung tatanan dunia yang adil di tengah arus perubahan geopolitik abad ke-21.

Daftar Pustaka:

- Özgür, M. (2023). *Blue Homeland Doctrine: Turkey's Maritime Strategy*. Journal of Naval Strategy.
- SIPRI. (2024). *Laporan Tren Transfer Senjata Global – Data ekspor senjata Turki 2015–2024 (peningkatan 103%)*.
- Jokowi. (2014). *Pidato Visi Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Maritim. (2017). *Rencana Aksi Implementasi Poros Maritim Dunia*. Jakarta.
- Lain-lain (laporan, artikel jurnal, dan sumber daring relevan). researchgate.net/turkishminute.com